



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pergerakan global membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan bagaimana cara manusia menjalani kehidupannya. Terlebih lagi, globalisasi adalah sebuah efek yang tidak bisa dihindari yang mengharuskan setiap individu menghadapi dan merasakan dampak dari hal tersebut. Globalisasi pun mendorong adanya pembangunan yang cepat dan perkembangan transportasi sehingga mobilitas pun meningkat, mengingat jarak bukanlah sebuah kendala lagi. Tidak hanya itu, globalisasi menunjukkan adanya peningkatan ketergantungan antara pemerintah, perusahaan, organisasi nirlaba dan penduduknya secara individu (Gannon, 2008, dikutip dalam Samovar, 2010, h. 3).

Samovar juga menyebutkan, globalisasi secara antropologi merupakan keterkaitan yang menyeluruh antara pergerakan global dari sumber daya alam, perdagangan barang barang, tenaga kerja manusia, modal keuangan, informasi dan penyakit menular (Samovar, 2010, h. 3). Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan interaksi antara orang-orang, perusahaan dan pemerintah dari

negara yang berbeda. Hal ini juga tercermin dengan adanya perdagangan barang lintas negara, pengiriman tenaga kerja ke negara lain, diseminasi informasi yang tidak mengenal batas ruang dan waktu.

Samovar mengatakan bahwa globalisasi telah menyebabkan sebuah dunia di mana jutaan orang meninggalkan suatu tempat ke tempat lain dengan harapan mencari pekerjaan atau kesempatan yang lebih baik (2010, h. 69). Oleh karena itu, globalisasi mengakibatkan meningkatnya perdagangan lintas negara dan pengiriman tenaga kerja, kesempatan untuk studi di luar negeri sehingga membuat banyaknya pendatang-pendatang dari berbagai negara. Hal ini yang kemudian mengakibatkan adanya *melting pot*.

Melting pot atau kuali peleburan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan suatu masyarakat yang heterogen. Masyarakat dari berbagai budaya berkumpul dan melebur menjadi satu kesatuan. Dengan demikian, globalisasi membuka pintu untuk terjadinya akulturasi dan percampuran budaya sehingga menghasilkan masyarakat yang multikultural.

Globalisasi juga terjadi di Indonesia yang ditandai dengan revolusi budaya. Masyarakat Indonesia telah dipaksa untuk melihat berbagai budaya, subbudaya dan subkelompok yang baru. Adanya pendatang dari bangsa lain seperti Tionghoa, Eropa, Hispanik dan Arab telah menyadarkan kita bahwa kontak antarbudaya tidak saja tak terhindarkan. Budaya-budaya tersebut

kemudian terakulturasi ke dalam budaya-budaya asli, diterima dan diolah tanpa menyebabkan unsur kebudayaan asli tersebut menjadi hilang (Wicaksono, 2017, para. 10).

Indonesia dikenal sebagai negara yang pluralis dan heterogen. Hal ini karena letaknya yang berada di antara dua benua dan berdasarkan sejarah, Indonesia menjadi kawasan perdagangan strategis yang seringkali dikunjungi oleh pedagang maupun pendatang dari berbagai belahan dunia. Perbedaan berbagai budaya pun tercermin dalam semboyan negara, *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, sehingga perbedaan budaya bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia.

Menyandang gelar sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan total luas wilayah lima juta kilometer persegi dan memiliki kurang lebih 17 ribu pulau yang tersebar di seluruh penjuru negeri, menjadi keunggulan namun juga kerumitan bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang dilansir oleh JPNN, tercatat Indonesia memiliki suku bangsa sebanyak 1.128 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk pada sensus 2012 adalah 2.600.000 jiwa (*"Indonesia Miliki 1.128 Suku Bangsa, 2010, para. 2).*

Selain itu, Nasir dalam Harian Kompas (2015, para. 1) menyebutkan Indonesia memiliki bahasa daerah terbanyak kedua setelah Papua Nugini, yakni sebanyak 749 bahasa daerah dan Indonesia secara resmi mengakui enam agama, yaitu Katolik, Islam, Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu.

Seringkali perbedaan budaya yang dibawa oleh pendatang atau kelompok minoritas tidak sesuai dengan ekspektasi dan kultur masyarakat Indonesia asli atau yang disebut dengan budaya dominan. Hal ini disebabkan, setiap budaya memiliki caranya tersendiri yang unik dalam memandang dunia. Pandangan dunia ini dikondisikan oleh lingkungan atau pengalaman historis yang dimiliki anggota-anggota suatu budaya (Mulyana & Rakhmat, 2010, h. 242).

Budaya dianggap sebagai pandangan yang memiliki tujuan untuk mengajarkan cara beradaptasi dengan lingkungannya dan dalam budaya sendiri memiliki beberapa elemen-elemen atau fitur-fitur seperti makanan, tempat tinggal, pekerjaan, agama, sejarah, *values*, organisasi dan kontrol sosial (Samovar, 2010, h. 28-29). Setiap elemen atau fitur dalam budaya tersebut akan berbeda bagi setiap individu.

Semakin banyak elemen dan fitur suatu budaya yang dimiliki oleh masing-masing individu maka akan semakin beragam pula perbedaan budayanya. Semakin beragam perbedaannya maka akan berdampak pada

tingginya potensi konflik yang bisa dialami oleh setiap individu maupun antar golongan. Apabila perbedaan-perbedaan tersebut tidak bisa dikelola dengan baik maka akan mudah untuk memicu konflik baik skala kecil maupun besar.

Melihat latar belakang Indonesia sebagai negara yang heterogen dan pluralis, konflik antarbudaya pun cukup banyak terjadi. Contohnya saja konflik Maluku yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama antara kelompok Islam dan Kristen yang menewaskan 8-9 ribu jiwa, membakar 29 ribu rumah, puluhan tempat ibadah, hingga fasilitas publik dan kantor pemerintahan (“Konflik yang Dipicu Keberagaman Budaya Indonesia, 2015, para. 6). Konflik antarbudaya lainnya adalah konflik Sampit yang melibatkan kelompok etnis Dayak dan Madura yang berujung pada tindakan kekerasan, pembunuhan dan pembantaian etnis tersebut. Alasan dari konflik yang berujung pada kekerasan ini adalah tidak adanya manajemen konflik yang baik dari kedua belah pihak (“Konflik yang Dipicu Keberagaman Budaya Indonesia”, 2015, para. 3). Begitu pula konflik yang terjadi di Poso, Papua, Aceh, Ternate dan sebagainya.

Salah satu konflik antarbudaya yang sangat melegenda dan menyisakan duka serta menjadi sejarah kelam bagi pemerintahan Indonesia adalah konflik 1998, di mana etnis Tionghoa yang menjadi korbannya. Akibat dari konflik itu, ribuan warga Tionghoa hilang, toko-toko dijarah, dan wanita etnis Tionghoa diperkosa oleh oknum yang tidak bertanggungjawab padahal

seperti yang dikutip dalam Republika, Indonesia merupakan negara pengakomodasi etnis Tionghoa terbesar ketiga setelah RRC dan Taiwan (Zuraya, para. 1, 2016).

Alasan dari konflik ini pun bermula dari krisis moneter dan pemberontakan mahasiswa termasuk beberapa oknum yang ingin menggulingkan pemerintahan saat itu. Sayangnya, hasil dari pemberontakan itu pun menjadi bias karena etnis Tionghoa yang menjadi korbannya. Konflik ini menjadi sentimen berkepanjangan, ditambah lagi dengan masa kelam pembantaian massal pada 1965.

Rupanya, konflik antar etnis masyarakat Pribumi dan Tionghoa sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada 1740, terjadi pembantaian besar-besaran kepada etnis Tionghoa oleh VOC di Jakarta (Batavia), alasannya tak lain karena faktor ekonomi. Banyaknya pabrik gula tebu yang bankrut pada masa itu mengakibatkan tingginya tingkat kriminalitas sehingga VOC mengeluarkan peraturan untuk menekan jumlah orang Tionghoa di Batavia. Peristiwa ini dikenal sebagai Tragedi Angke (Asyhad, 2013, para. 8).

Suku Tionghoa pun sebenarnya sudah lama mendiami Indonesia, Susan Blackburn (2011, dikutip dalam Dhani, 2016, para 6) mengatakan bahwa suku Tionghoa sudah ada di Indonesia sebelum kedatangan Belanda dan relasi masyarakat Tionghoa dengan suku Pribumi saat itu adalah rekanan

bisnis. Menurut KBBI daring, Pribumi adalah penghuni asli, orang yang berasal dari tempat yang bersangkutan (KBBI, 2017, para. 1). Lebih lanjut, Wicaksono (2017, para. 3-4) mengatakan kaum pribumi menurut pandangan masyarakat Indonesia awam adalah suku-suku asli Indonesia seperti Batak, Jawa, Minangkabau, Bali, Dayak, Papua dan suku lainnya sementara orang keturunan Eropa, Arab, India, Tionghoa yang cukup banyak ditemukan di Indonesia dianggap sebagai orang asing atau pendatang.

Menurut Herawati Sudoyo (2017, dikutip dalam Wicaksono, 2017, para. 5-7), pribumi diidentifikasi sebagai orang yang menghuni kawasan tertentu sejak lama, namun faktanya penduduk Indonesia berasal dari kaum Melanesia dan Austronesia yang datang ke tanah air. Melanesia adalah keturunan Afrika yang bermata biru, datang sekitar 50.000 tahun yang lalu dan menempati Indonesia bagian Timur. Dilanjutkan pada 16.000-35.000 tahun yang lalu, terjadi migrasi dari Indocina melalui jalur darat dan terakhir 4.000 tahun yang lalu, kaum Austronesia datang. Akhirnya mereka semua berkembang dan menjadi berbagai suku Indonesia yang kita kenal saat ini.

Setelah Austronesia datang ke nusantara, barulah pendatang dari India, Tionghoa dan Arab datang ke Indonesia (nusantara) untuk berdagang. (Wicaksono, 2017, para. 8). Hubungan antarbudaya ini kemudian menghasilkan banyak perkawinan silang. Data terbaru menunjukkan gen masyarakat Indonesia saat ini adalah 74% dari Asia Tenggara dan Oseania,

9% dari Asia Selatan, 5% dari Asia Timur, 6% Arab dan 6% Afrika. (Wicaksono, 2017, para. 11).

Keturunan dari Austronesia maupun dari perkawinan silang dengan para pendatang menghasilkan generasi baru sebagai satu keutuhan Nusantara. Namun ketika bangsa Eropa datang, mereka mulai mengelompokkan dan membedakan orang berdasarkan asal usul etnisnya. Bangsa Eropa menempatkan diri mereka sebagai kasta tertinggi disusul oleh pendatang dari Timur seperti Tionghoa, India dan Arab sebagai golongan kedua dan kaum Pribumi sebagai kaum pekerja atau kasta terendah.

Dari sinilah istilah Pribumi dan nonpribumi pertama kali muncul meskipun sebenarnya pendatang dari Timur telah membaaur dan menciptakan sebuah generasi baru sebagai keutuhan satu Nusantara. Sayangnya hal ini menjadi sebuah kesulitan bagi masyarakat “campuran” atau masyarakat turunan dari pendatang atau hasil perkawinan campuran dengan kaum pendatang, karena mereka tidak jelas masuk ke golongan mana (Wicaksono, 2017, para. 10).

M Irfan, Kepala Balai Arkeolog Makassar (dikutip dalam Subadja, 2017, para. 8) mengatakan definisi pribumi sekarang merujuk pada kelompok ras mayoritas yang menghuni Indonesia. Jadi meskipun etnis Tionghoa, termasuk Tionghoa Peranakan lahir dan besar di Indonesia, menggunakan

bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, mereka masih dipandang sebagai non-pribumi karena termasuk golongan kaum minoritas.

Konflik antaretnis Tionghoa dan Pribumi terus berlanjut dan merambah daerah lain seperti Solo, Kalimantan Barat, Palembang, Medan hingga Tangerang. Dhani (2016, para. 15) menuliskan, dalam rentang tahun 1946-1965 terjadi gerakan anti Tionghoa di Tangerang, Palembang dan Makassar. Ada juga pembantaian besar-besaran terhadap etnis Tionghoa atas tuduhan terlibat komunisme di Medan pada 10 Desember 1966 dan peristiwa Mangkuk Merah di Kalimantan Barat pada November 1967.

Peristiwa Mangkuk Merah pada 1967 adalah pembantaian terhadap 30.000 orang etnis Tionghoa atas nama PGRS/PARAKU. Dhani (2016, para. 15). juga menjelaskan dalam buku Tandjoengpoera Berdjoeng 1977, setidaknya ada 27.000 orang mati dibunuh, 101.700 warga mengungsi di Pontianak dan 43.425 direlokasi di Kabupaten Pontianak.

Perbedaan strata sosial dan ketegangan ini terus melekat dalam benak Pribumi dan nonpribumi. Meskipun pada masa Soekarno, banyak tokoh negarawan yang menghilangkan *labeling* ini dengan catatan mereka sudah menetap, berbudaya dan berbahasa Indonesia, pada masa Soeharto istilah ini kembali muncul yang kemudian menghasilkan sejarah kelam bagi warga Tionghoa di Indonesia yaitu peristiwa 1998. Setelah orde baru berakhir,

mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghapus istilah tersebut karena alasan diskriminasi (Wicaksono, 2017, para. 11). Akhirnya selama 10 tahun terakhir ini, warga Tionghoa bisa merayakan tradisi leluhurnya seperti Tahun Baru Cina (Lamb, 2013, para. 9).

Pada masa Indonesia modern, sentimen yang terjadi antara etnis Pribumi dan Tionghoa menghangat kembali. Pilkada DKI diwarnai dengan berbagai isu ras karena petahana, Basuki Tjahja Purnama merupakan keturunan Tionghoa dan dianggap sebagai *proxy* masuknya pengusaha Tionghoa ke Indonesia, khususnya Jakarta (Anshori, 2017, para. 1). Belum lagi pada pilpres 2014 lalu, ketakutan etnis Tionghoa masih terasa karena salah satu kandidatnya, Prabowo, masih dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM kasus 1998.

Fransisca (2014, para. 4) menuliskan bahwa suara Tionghoa pada pilpres 2014 menunjukkan partisipasi yang cukup signifikan karena pada pilpres tersebut suara mereka akan mempengaruhi kehidupan etnis Tionghoa selama 5 tahun ke depan. Jumlah penduduk Tionghoa di Indonesia pun tersebar di pulau Jawa, Sumatra hingga Kalimantan. Menurut sensus penduduk 2010, warga keturunan Tionghoa di Indonesia mencapai 2,8 juta penduduk atau sekitar 1,2% dari total penduduk Indonesia (Na'im & Syahputra, 2010, h. 37)

Sofyan Wanandi dikutip oleh Fransisca (2014, para. 3) menyebutkan bahwa jumlah penduduk keturunan Tionghoa sebenarnya lebih banyak dari data BPS dan memperkirakan jumlahnya mencapai 10 juta jiwa dan menempati peringkat ketiga suku terbesar di Indonesia setelah Jawa dan Sunda namun banyak dari mereka yang enggan mengakui hal tersebut. Tampaknya para etnis Tionghoa pun ingin dianggap sebagai warga negara asli Indonesia tapi masih saja mendapatkan diskriminasi.

Terlepas dari banyaknya definisi siapakah Tionghoa dan siapa saja yang bisa disebut sebagai warga Indonesia asli, nyatanya warga Tionghoa pun berusaha untuk beradaptasi dengan budaya Indonesia. Dari segi kebudayaan Indonesia, banyak budaya suku-suku Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya Cina. Banyaknya pendatang Tionghoa yang menikah dengan penduduk asli Indonesia dan kemudian menetap di Indonesia melahirkan sebuah golongan baru, Tionghoa peranakan. Perkawinan ini tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga ragam sosial budaya serta kulinernya (Indonesia, Asal Muasal Budaya Peranakan, 2012, para. 3). Salah satu bukti peleburan budaya dan adaptasi para etnis Tionghoa terhadap budaya Indonesia adalah kebaya encim, yang juga menjadi ciri khas baju kebaya suku Betawi (Juniman, 2017, para. 1).

Selain baju adat, lagu daerah dan alat musik daerah juga sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya peranakan seperti lagu Injit-Injit Semut, alat

musik keroncong dan juga lenong. (Indonesia, Asal Muasal Budaya Peranakan, 2012, para. 7). Dalam hal kuliner, ada sekuteng dan cincau bahkan beberapa kosakata yang kita kenal sehari-hari juga dipengaruhi oleh budaya Tionghoa seperti goban (lima puluh ribu rupiah), noban (dua puluh ribu rupiah) dan engkong (kakek). Pada dasarnya, memang suku Jawa dan Betawi yang mendapat banyak pengaruh dari budaya peranakan.

Adanya perbedaan asal budaya dan peleburan dari kedua budaya menghasilkan sebuah proses adaptasi yang menjadi topik menarik untuk diteliti lebih lanjut. Tidak hanya dari segi kesenian dan kuliner, namun bagaimana etnis Tionghoa, khususnya Tionghoa peranakan, beradaptasi dengan masyarakat Indonesia asli yang berbeda secara suku maupun agama dalam interaksi sosial secara langsung seperti di lingkungan pertemanan.

Seperti yang sudah dijelaskan bagaimana semakin besar perbedaan yang ada akan berpengaruh pada tingginya potensi konflik, maka hal ini menunjukkan bahwa manajemen konflik bahkan dalam lingkup sekecil apapun sangat penting. Bagaimana kedua budaya bisa menjembatani perbedaan dalam satu situasi tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut adalah hal yang sangat krusial dan tentunya, perbedaan dari masing-masing budaya yang dikompromikan akan mencerminkan toleransi dalam kehidupan antarbudaya. Budaya yang telah melekat dalam diri individu tersebut akan terbawa masuk ke dalam lingkup pertemanan. Uniknya,

perbedaan-perbedaan budaya tidak membatasi individu dalam bergaul dan berkumpul meskipun perbedaan bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam pertemanan.

Pertemanan sendiri merupakan salah satu lingkup interaksi sosial yang cukup kecil. Pertemanan adalah jenis hubungan yang tidak terstruktur dan tidak adanya standar aturan yang baku atau formal dalam berteman. Lain halnya dengan hubungan kerja antar bos dan bawahan yang mempunyai struktur dan aturan formal. Pertemanan sendiri bersifat hidup dan dinamis. Pertemanan pun merupakan salah satu fenomena sosial yang dimiliki seluruh individu sebagai makhluk sosial di mana seorang individu belajar berinteraksi dengan orang lain di luar lingkup keluarga.

Umumnya tidak ada peraturan baku atau syarat yang paten dengan siapa saja manusia harus berteman, namun biasanya didasari oleh ketertarikan yang sama seperti hobi atau latar belakang yang mirip. Meskipun memiliki kesamaan yang mendasari pertemanan, akan ada beberapa hal yang memicu konflik seperti kesalahpahaman, perbedaan pandangan hingga perbedaan nilai yang terbentuk karena perbedaan budaya.

Menilik begitu banyak konflik antar Pribumi dan Tionghoa sejak dulu dan kembali menghangat dengan isu PILKADA DKI, banyaknya

sentimen negatif dan diskriminasi yang dirasakan oleh etnis Tionghoa, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana mahasiswa etnis Tionghoa dan Pribumi melakukan strategi manajemen konflik dalam pertemanan antarbudaya, terlepas dari sejarah kelam konflik etnis Tionghoa dan Pribumi.

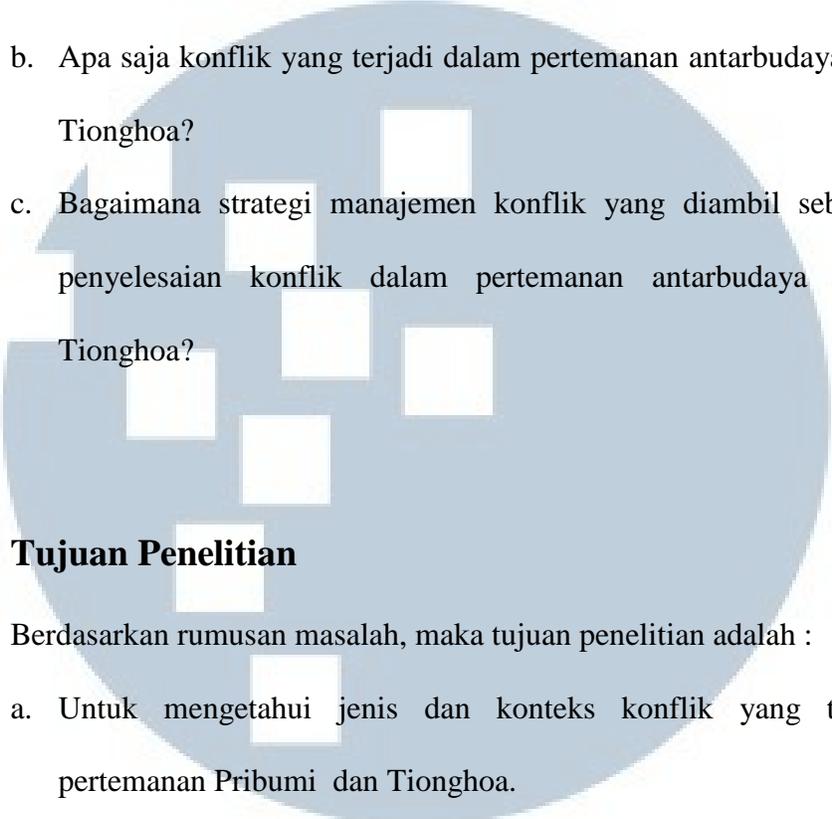
Dalam penelitian ini, penulis akan mencari tahu bagaimana perbedaan budaya dari etnis Pribumi dan Tionghoa bisa menciptakan konflik-konflik tertentu dalam pertemanan dan bagaimana individu tersebut melakukan manajemen konflik untuk mempertahankan pertemanan antarbudaya.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah empat orang mahasiswa yang berkuliah di universitas swasta di Tangerang dan Jakarta serta mempunyai teman dekat beda etnis. Waktu penelitian dilakukan pada akhir Juni 2017 selama beberapa minggu, menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi dokumen.

1.2. Perumusan Masalah

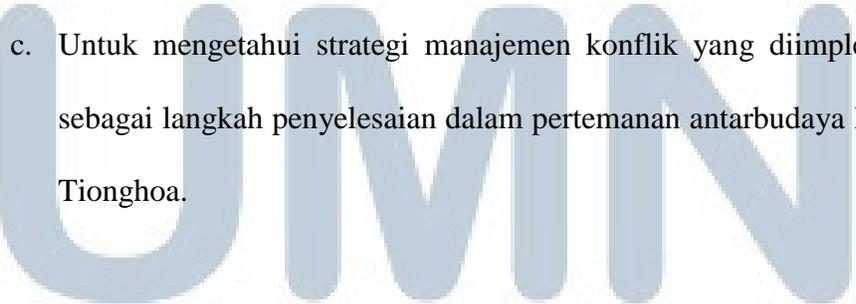
Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan :

- a. Apakah jenis dan konteks konflik yang terjadi dalam pertemanan antarbudaya Pribumi dan Tionghoa?

- 
- b. Apa saja konflik yang terjadi dalam pertemanan antarbudaya Pribumi dan Tionghoa?
 - c. Bagaimana strategi manajemen konflik yang diambil sebagai langkah penyelesaian konflik dalam pertemanan antarbudaya Pribumi dan Tionghoa?

1.3. Tujuan Penelitian

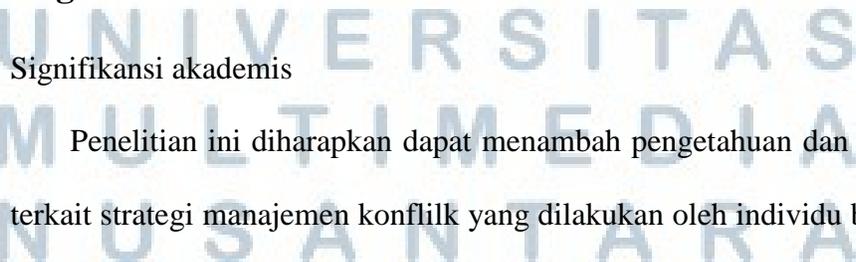
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui jenis dan konteks konflik yang terjadi dalam pertemanan Pribumi dan Tionghoa.
 - b. Untuk mengetahui konflik-konflik apa yang terjadi dalam pertemanan antarbudaya Pribumi dan Tionghoa.
 - c. Untuk mengetahui strategi manajemen konflik yang diimplementasikan sebagai langkah penyelesaian dalam pertemanan antarbudaya Pribumi dan Tionghoa.
- 

1.4. Kegunaan Penelitian

- Signifikansi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait strategi manajemen konflik yang dilakukan oleh individu beda budaya



dalam mempertahankan hubungan pertemanan serta memberikan kontribusi positif bagi ilmu komunikasi, khususnya ilmu komunikasi antarbudaya.

- Signifikansi praktis

Sebagai pedoman atau acuan bagi individu individu dalam pertemanan antarbudaya dalam menyikapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam lingkup pertemanannya dan menambah *skill* dalam mengelola konflik yang terjadi dalam pertemanan antar budaya.

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA